



“MEMBANGUN KEMBALI DENGAN LEBIH BAIK”: TRANSISI ASIA TENGGARA KE EKONOMI HIJAU SETELAH COVID-19

Penilaian dan rekomendasi untuk Anggota Parlemen

 **LAPHR** ASEAN PARLIAMENTARIANS
FOR HUMAN RIGHTS

 **Hanns
Seidel
Foundation**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi yang menyertainya telah mengungkap kegagalan dan kerapuhan sistem ekonomi kita saat ini, yang memprioritaskan kepentingan bisnis di atas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, memperdalam ketidaksetaraan dan gagal melindungi mereka yang paling rentan.

Di saat negara-negara di Asia Tenggara mengambil langkah-langkah untuk pulih dari resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19, serta kebijakan untuk meningkatkan ekonomi mereka, kini hadir peluang ideal untuk melepaskan diri dari masa lalu dan beralih ke ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan tangguh yang melindungi hak asasi manusia semua orang.

Beralih menuju perekonomian yang lebih hijau adalah bagian dari upaya “membangun kembali dengan lebih baik” yang mencakup perubahan dari industri-industri berbahan bakar fosil dan bergerak menuju sumber energi bersih dan terbarukan yang menyebabkan sedikit atau tanpa polusi serta membantu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan pemanasan global. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu Kawasan ini lebih cepat menyerap dampak langsung resesi, tetapi juga menghindari dan menjadi lebih tahan terhadap guncangan dan krisis serupa di masa depan akibat perubahan iklim.

Sebagai salah satu wilayah paling berisiko di dunia dari perubahan iklim, Asia Tenggara memiliki banyak keuntungan dengan mengadopsi pemulihan ekonomi hijau dari COVID-19. Dalam Kerangka Pemulihan Komprehensif ASEAN sendiri, pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara mengakui bahwa: “perubahan iklim merupakan risiko mendasar bagi ASEAN”, dan bahwa “tindakan untuk mengurangi dampak perubahan iklim harus segera diambil”.¹

Rencana pemulihan hijau dari COVID-19 mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu juga akan membantu menghindari penurunan 25% dalam PDB ASEAN; meredakan krisis utang kawasan; membantu menciptakan lapangan kerja di sektor ramah iklim; dan mengatasi krisis hak asasi manusia skala besar yang diakibatkan oleh COVID-19 dan perubahan iklim.

Untuk membantu para Anggota Parlemen memanfaatkan kesempatan ini, Anggota Parlemen ASEAN bagi Hak Asasi Manusia (*ASEAN Parliamentarians for Human Rights, APHR*) telah mengevaluasi langkah-langkah pemulihan yang dilakukan di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Timor-Leste antara Februari 2020 dan April 2021. Penilaian ini dilakukan untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh para Anggota Parlemen di negara masing-masing, serta berbagai hambatan struktural yang perlu diatasi guna mempromosikan peralihan ke perekonomian hijau.

Berdasarkan asesmen yang dilakukannya, APHR menemukan bahwa hanya langkah-langkah minimal dari kebijakan hijau yang telah diadopsi sebagai bagian dari rencana nasional pemulihan COVID-19. Selain itu, beberapa langkah positif yang disetujui dirusak oleh pengadopsian berbagai langkah kebijakan yang menyumbang pemanasan global dan menciptakan hambatan serius untuk transisi ke ekonomi rendah karbon. Negara-negara di kawasan ini jelas tidak memiliki strategi terpadu dalam pemulihan hijau dari COVID-19.

1 ASEAN Secretariat. (Nov 2020). ASEAN Comprehensive Recovery Framework. 37th ASEAN Summit, Ha Noi, Viet Nam: ASEAN Secretariat, p 38.

Di antara beberapa kebijakan yang diadopsi kondusif untuk transisi ekonomi hijau adalah:

- Subsidi dan pengurangan pajak untuk produk ramah lingkungan seperti di Indonesia dan Filipina di mana pemerintah mengeluarkan pengurangan pajak untuk industri dan usaha mikro, kecil dan menengah yang mengadopsi proyek energi terbarukan;
- Kenaikan pajak untuk produk yang berbahaya bagi lingkungan seperti di Singapura, di mana pemerintah diperkirakan akan menaikkan tarif pajak bahan bakar hingga 15% per liter sebagai bagian dari tujuan jangka panjangnya mendukung kendaraan listrik;
- Investasi infrastruktur transportasi bersih seperti alokasi anggaran pemerintah Filipina untuk mengembangkan trotoar yang dapat diakses dan jalur sepeda yang dilindungi di bawah Undang-Undang Bayanihan to Recover as One yang disahkan pada September 2020;
- Insentif untuk kendaraan listrik seperti pemberian potongan harga (rabat) oleh pemerintah Singapura untuk pendaftaran dan pajak kendaraan listrik selama masa pandemi;
- Investasi infrastruktur energi bersih seperti yang terlihat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura di mana pemerintah mengambil langkah-langkah mempercepat produksi energi bersih melalui pemberian insentif untuk pemasangan panel surya di atap, lampu jalan LED, dan jalur transmisi energi listrik;
- Pendanaan penelitian dan pengembangan (litbang) bersih seperti yang terlihat di Thailand di mana pada November 2020 Dewan Investasi menyetujui proyek senilai lebih dari 1 miliar dollar AS, yang mencakup rantai pasokan, penelitian, dan pengembangan kendaraan listrik;
- Insentif untuk peralatan listrik hemat energi dan energi bersih seperti yang terlihat di Singapura di mana pemerintah menyediakan voucher bagi rumah tangga yang menggunakan peralatan hemat energi dan air, seperti lemari es ramah iklim, perlengkapan mandi hemat air, dan lampu LED;
- Dukungan untuk renovasi bangunan dan pembangunan perumahan hijau baru seperti di Singapura di mana pemerintah berencana untuk meningkatkan kebutuhan energi minimum bangunan baik yang baru maupun yang sudah berdiri, dan untuk memastikan bahwa setidaknya 80% bangunan Singapura akan dihijaukan pada tahun 2030;² dan
- Investasi infrastruktur alam dan ruang hijau seperti di Singapura, di mana pemerintah mencurahkan sumber daya untuk memperbaiki tata ruang alamiah negara tersebut.

Bagaimanapun juga, kebijakan ini secara kritis dirongrong oleh banyak langkah yang merusak lingkungan. Misalnya, dana talangan tanpa persyaratan hijau untuk bisnis penghasil GRK tinggi melebihi 50 miliar dollar AS di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura.³ Subsidi pemerintah untuk produk dan industri yang berbahaya bagi lingkungan juga membatalkan langkah-langkah positif yang diambil. Misalnya, pembebasan pajak sepenuhnya bagi penjualan kendaraan buatan dalam negeri oleh pemerintah Malaysia mendorong kendaraan berpolusi lebih tinggi berdasarkan emisi GRK.⁴ Lebih lanjut, tidak ada bukti pelatihan ulang pekerja hijau dan langkah-langkah penciptaan lapangan kerja yang ditemukan selama pandemi, yang secara serius menghambat kemampuan kawasan untuk bergerak cepat menuju ekonomi hijau.

Di antara negara-negara yang menjadi pusat perhatian, Singapura memiliki langkah pemulihan paling banyak di berbagai sektor yang mendukung pemulihan hijau, sedangkan Indonesia dan Filipina memiliki paling banyak langkah pemulihan yang sebaliknya.

2 "Greened" in this instance refers to buildings meeting minimum energy performance requirements established by the Building and Construction Authority and the Singapore Green Building Council in the Singapore Green Building Masterplan. See: <https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-building-masterplans>.

3 ADB. (26 Apr 2021). ADB COVID-19 Policy Database. Data calculated from 01 – Liquidity support and 04 – Equity support in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Singapore. <https://covid19policy.adb.org/policy-measures>.

4 Justin Lim. (Mar 2021). Malaysian Automotive Association says has not planned to apply for sales tax exemption extension. The Edge Markets. <https://www.theedgemarkets.com/article/malaysian-automotive-association-says-has-not-planned-apply-sales-tax-exemption-extension>.

Tantangan utama guna membuka kesempatan bagi pemulihan hijau di kawasan ini meliputi kerangka kelembagaan yang lemah mengenai perubahan iklim, kendala sumber daya, dan kurangnya transparansi data serta kerja sama lintas sektor

Ke depan, tindakan legislatif para anggota parlemen akan memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa terhadap perekonomian dan lingkungan. Dalam konteks ini, anggota parlemen memiliki peran penting dalam mempromosikan pemulihan hijau. Melalui kuasa legislasi, pengawasan anggaran, dan mandat konstitusional, para anggota parlemen berada di jantung pemenuhan komitmen perubahan iklim, yang membentuk kehidupan sehari-hari konstituen mereka. Mereka dapat memainkan peran unik untuk memastikan kawasan ini “membangun kembali dengan lebih baik” dengan:

- Mendesak pemerintah untuk menyampaikan target NDC (Nationally Determined Contributions) yang lebih ambisius ke Perjanjian Paris dan meminta pertanggungjawabannya atas target-target yang ada dengan meminta pembaruan kemajuan secara teratur;
- Menggunakan manifesto APHR, laporan ini, dan dokumen relevan lainnya untuk mempromosikan penerapan kebijakan pemulihan hijau yang teridentifikasi;
- Memprioritaskan alokasi anggaran untuk energi terbarukan, transportasi umum, efisiensi energi, kendaraan listrik, dan bidang utama lainnya yang mendukung transisi ekonomi rendah karbon;
- Mempromosikan investasi infrastruktur alami dan ruang hijau selama pembahasan anggaran untuk mencegah potensi kerusakan akibat bencana terkait iklim, seperti banjir
- Memastikan penilaian dampak sosial dan lingkungan dilakukan untuk semua proyek pemulihan dengan konsultasi publik sebelum memberi keputusan persetujuan di parlemen;
- Menyerukan keprihatinan lingkungan dan hak asasi manusia akibat pengembangan batubara dan kebijakan lain yang berbahaya bagi lingkungan, yang dapat memperbesar hilangnya PDB (produk domestik bruto) di masa depan;
- Mempromosikan partisipasi masyarakat yang berarti dan hak-hak partisipatif lingkungan mereka untuk memastikan pemulihan hijau yang mendukung hak asasi manusia orang-perorang.
- Menetapkan kerangka kerja nasional tentang perubahan iklim yang konsisten dengan Perjanjian Paris, untuk meningkatkan saling melengkapi antara undang-undang lingkungan dan ekonomi nasional, dan memperkuat pengawasan komitmen nasional dan internasional;
- Bertemu dengan konstituen untuk memahami masalah iklim yang paling mendesak mereka serta menyampaikannya ke pemerintah; dan
- Menggunakan komisi dan pembahasan di parlemen untuk mengarusutamakan isu iklim dan meminta masukan dari aktor non-negara, seperti kelompok masyarakat sipil, untuk rencana pemulihan.

Indonesia

- Gunakan pembahasan anggaran untuk memperjelas posisi pemerintah tentang tidak meningkatkannya NDC yang diajukan dan menyoroti dampak tindakan ini pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang;
- Menetapkan persyaratan-persyaratan hijau pada dana talangan untuk bisnis besar termasuk BUMN, seperti PT Pertamina, Garuda Indonesia, dan PLN, sesuai dengan Persetujuan Paris;
- Menghapus subsidi bahan bakar fosil dan menghentikan secara bertahap (phase-out) penggunaan batu bara pada tahun 2040 untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi energi terbarukan;
- Mendorong dialog di antara konstituen-konstituen dan para pembuat kebijakan tentang pentingnya aksi iklim di media dan di acara-acara publik dengan membahas bahaya Omnibus Law, UU Minerba, dan upaya deregulasi lingkungan lainnya; serta
- Memberi insentif bagi pelatihan kerja di sektor-sektor yang positif bagi ekonomi hijau, seperti energi terbarukan dan efisiensi energi, dengan memprioritaskannya dalam program Kartu Pra Kerja.

“MEMBANGUN KEMBALI DENGAN LEBIH BAIK”: TRANSISI ASIA TENGGARA KE EKONOMI HIJAU SETELAH COVID-19

Penilaian dan rekomendasi untuk Anggota Parlemen
